**ANALISIS PERAN DAN MANFAAT JASA KONSULTAN PAJAK
TERHADAP PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI DAN BADAN**

Stefani Ayu A¹

Email: stefaniayu97@gmail.com

Alberta Esti Handayani, SE, Ak, MM²

Email : albertaestihandayani@unitomo.ac.id

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Peran dan Manfaat Jasa Konsultan Pajak Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Kantor Konsultan Pajak Smart Solution. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 80 Wajib Pajak yang menggunakan jasa Kantor Konsultan Pajak Smart Solution, terdiri atas 30 Wajib Pajak Orang Pribadi dan 50 Wajib Pajak Badan. Data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer. Hasil uji Validitas menunjukkan data kuisioner valid dan pada uji Reliabilitas diperoleh nilai cronbach alpha $> 0,60$ maka dinyatakan reliabel. Penelitian pada Uji F dan Uji T dengan nilai signifikansi kurang dari 5% menunjukkan bahwa peran dan manfaat jasa konsultan pajak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan. Sedangkan R square sebesar 50,8% variabel peran jasa konsultan pajak dan manfaat jasa konsultan pajak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan.

Kata Kunci : Peran dan Manfaat Jasa Konsultan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of The Role and Benefits of Tax Consultant Services on the Increasing Compliance of Individual and Corporate Taxpayers At Smart Solution Tax Consultant Office. This quantitative research used a purposive sampling method involving 80 taxpayers, consisting

of 30 individuals and 50 corporations who had used the Smart Solution Tax Consultant Office services. The data used was primary. The validity test confirmed that the questionnaire data was valid, and the Cronbach alpha value of $> 0,60$ in the reliability test indicated reliability. The F Test and T Test results, with a significance value of less than 5%, implied that the role and benefits of tax consultant services influenced the increasing compliance of individual and corporate taxpayers. In addition, the R square of 50,8% also indicated that the role and the benefits variables of tax consultant services influenced the increasing compliance of individual and corporate taxpayers.

Keyword: *Role and Benefits of Tax Consultant Services, Compliance Taxpayer*

I. LATAR BELAKANG

Pada masa pemerintahan kolonial belanda pajak mulai dikenakan. Pada tahun 1839 pajak yang diterapkan pada saat itu seperti pajak rumah, pajak usaha, sewa tanah maupun pajak kepada pedagang dan pada saat itulah diterapkannya perpajakan modern. Pajak Perseroan atau Pajak Penghasilan Badan tahun 1925. Tetapi pada saat itu, rakyat Indonesia harus menyetornya ke pemerintah Belanda. Zaman Belanda dan saat penjajahan Jepang memungut pajak dari berbagai hasil bumi yang ada di Indonesia. Hingga saat ini, pajak sudah mengalami perkembangan yang begitu pesat. Tahun anggaran 1995, pemerintah mulai menempatkan sektor pajak sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara. Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara khususnya dalam pelaksanaan Pembangunan. Pajak memiliki dua fungsi penting untuk perekonomian sebuah negara yang pertama pajak menjadi salah satu sumber dana pemerintah dalam melakukan pembangunan, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dan yang ke dua pajak berfungsi sebagai alat yang digunakan dalam mengatur kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi (Siti Resmi, 2013).

Direktur Jenderal Pajak melakukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan penerimaan pajak karena peran pajak yang penting. Salah satu upaya strategis tersebut adalah pembentukan sistem pemungutan pajak yang sah yang terdiri dari tiga sistem: Self Assessment System, Official Assesment System, dan Withholding Assesment System. Dalam Undang-undang nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Self Assesment System merupakan system pemungutan pajak di Indonesia dan mulai masuk setelah era reformasi perpajakan pada tahun 1983 dan masih berlaku hingga saat ini, sistem perpajakan tersebut memiliki konsekuensi karena wajib pajak berhak menghitung jumlah pajak yang perlu dibayar.

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, wajib pajak adalah

orang atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, serta memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Orang atau badan yang memenuhi kriteria ini harus melaporkan penghasilan, kekayaan, dan properti yang mereka miliki. Subjek pajak tersebut diwajibkan untuk membayar pajak atas kekayaan yang dimiliki dan atas pendapatan atau laba yang diperolehnya. Keduanya memiliki kewajiban yang sama untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Wajib Pajak orang pribadi merupakan seseorang yang memiliki penghasilan dan bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan wajib pajak badan adalah sekumpulan orang atau kelompok yang bergabung dan bekerjasama dalam bentuk modal yang diwajibkan untuk terlibat dalam ketentuan perpajakan terlepas dari mereka melakukan usaha atau tidak melakukan usaha. Wajib Pajak baik orang pribadi dan badan dengan kesadaran yang penuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya dapat berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk pembangunan negara.

Besarnya target penerimaan perpajakan setiap tahun mampu dihimpun oleh pemerintah yang ditetapkan dalam UU APBN. APBN merupakan rancangan keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Pasal 23 ayat 1 UUD 1945 (perubahan) APBN merupakan suatu pernyataan mengenai perkiraan pengeluaran dan penerimaan negara yang diharapkan akan terjadi dalam suatu periode di masa depan atau yang akan datang, serta data dari pengeluaran dan penerimaan yang benar-benar terjadi di masa lalu. Persentase wajib pajak atau seseorang yang telah memiliki NPWP dan mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak aktif masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk di Indonesia. Kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak masih tergolong rendah dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan dan kewajiban pajaknya.

Pemahaman masyarakat tentang peraturan perpajakan sangatlah penting hal tersebut dapat mendorong kesadaran masyarakat terutama wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kewajiban yang umum untuk dilaksanakan oleh seorang wajib pajak adalah kewajiban untuk mendaftarkan dirinya atau usaha untuk mendapatkan NPWP, kewajiban untuk memberi data, kewajiban untuk melakukan pembayaran, pelaporan, pemungutan atau pemotongan pajak terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan, dan Wajib Pajak yang tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, maka wajib memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan, memberikan izin untuk memasuki ruangan pemeriksaan.

Kepatuhan wajib pajak adalah ketika seseorang memenuhi kewajiban pajak mereka sesuai dengan

peraturan atau undang-undang pajak. Ada dua jenis kepatuhan: kepatuhan formal dan kepatuhan material. Selama lima tahun terakhir, dia tidak pernah dipidana atas tindak pidana perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang tetap. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, kepatuhan formal dan material terdiri dari penyampaian SPT yang tepat waktu untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir. Tunggalan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir, atau dalam 2 tahun terakhir menyelengga SPT. Faktor yang mendasari seorang Wajib Pajak memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat dilihat dari pengetahuan tentang fungsi perpajakan, serta pengetahuan tentang hukum perpajakan.

Menurut keputusan Menteri Keuangan RI No. 294/KMK.04/1998 mengenai konsultan pajak pasal 1, jasa konsultan pajak adalah setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Jasa atau peran yang diberikan oleh Konsultan Pajak kepada wajib pajak adalah berkaitan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dari pajak. Jasa tersebut meliputi membantu Wajib Pajak membuat perhitungan pajak yang harus dibayar dan sekaligus membantu mereka mengisi SPT, laporan tahunan yang harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, memberikan konsultasi tentang masalah perpajakan.

Penelitian ini dilakukan karena diketahui adanya peningkatan Wajib Pajak baik Orang Pribadi maupun Badan yang bergabung menggunakan Jasa Konsultan pajak di Kantor Konsultan Smart Solution Tax mulai dari Tahun 2016 sejak awal berdirinya hingga saat ini. Peningkatan yang terjadi juga tidak terlepas dari adanya peran dan manfaat yang diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan khususnya yang menggunakan Jasa dari Kantor Konsultan Pajak Smart Solution.

Penelitian yang dilakukan Nugraheni et al.(2020) menunjukkan bahwa Konsultan Pajak memainkan peran penting dalam membantu individu yang bertanggung jawab atas pajak memenuhi kewajiban mereka. Dalam memberikan layanan, konsultan pajak memberikan teladan taat wajib pajak dan memengaruhi perilaku taat wajib pajak. Di sisi pemerintah, konsultan bertanggung jawab untuk memaksimalkan pendapatan pajak negara.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dapat membuktikan bahwa konsultan pajak tidak hanya dapat berperan aktif namun dapat memberikan manfaat bagi Wajib Pajak terhadap peningkatan kepatuhan kewajiban perpajakannya baik Wajib Pajak Orang

Pribadi maupun Badan. Sumber data melalui survey atau menyebarkan kuisioner kepada klien dari kantor Konsultan Pajak Smart Solution Tax di Sidoarjo sehingga dapat diperbandingkan dari antara penelitian sebelumnya dengan fenomena yang terjadi saat ini. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar manfaat dan peran konsultan pajak dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

II. LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pasal 1 angka 2 UU KUP menjelaskan bahwa wajib pajak adalah Orang Pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak dibagi menjadi dua yang pertama yaitu fungsi budgeter (sumber keuangan negara) pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Dan fungsi regularend (Pengatur) pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

3. Jenis-jenis Pajak

Jenis pajak dikelompokkan menjadi tiga yaitu :

1. Menurut golongan :

- a. Pajak langsung, pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.
- b. Pajak tidak langsung, pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

2. Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua :

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan subjeknya.

- b. Pajak objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak).
3. Menurut lembaga pemungut, dibagi menjadi dua :
 - a. Pajak pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.
 - b. Pajak daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga daerah.

4. Subjek Pajak

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak, yang menjadi Subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan adalah Orang Pribadi, Badan, Warisan, BUT.

5. Wajib Pajak

Wajib Pajak ialah orang pribadi atau badan , meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. (Rizky A & Yoosita.A, 2023). Sebagai subjek pajak, wajib pajak bebas untuk memilih tinggal di Indonesia ataupun di luar negeri. Menurut Undang-Undang Perpajakan tahun Nomor 6 tahun 1983 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

4. Konsultan Pajak

Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak Nomor 1, yang dimaksud dengan konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Terdapat syarat khusus yang harus

dipenuhi sebagai konsultan pajak yaitu memiliki sertifikikat Konsultan Pajak (Brevet Konslutan Pajak) dan Memiliki ijin praktek yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Pajak.

5. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai keadaan dimana seorang wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan, telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya dan menggunakan hak perpajakannya. Ada dua jenis kepatuhan, kepatuhan substantif dan formal. Kepatuhan formal terjadi ketika wajib pajak secara formal memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan perpajakan. Kepatuhan substantif terwujud apabila Wajib Pajak mengisi SPT atau Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jujur sebelum batas waktunya. (I Nengah, 2020).

6. Hipotesis

H1 : Peran Jasa Konsultan Pajak Terhadap Peningkatan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan

H2 : Manfaat Jasa Konsultan Pajak Terhadap Peningkatan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan

H3 : Peran dan Manfaat Jasa Konsultan Pajak Terhadap Peningkatan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan

III. METODE PENELITIAN

1. Identifikasi Variabel dan Pengukurannya

Menurut Sugiyono (2020:68), Pengertian variabel penelitian adalah ciri suatu individu atau organisasi yang dapat diamati dan mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dijadikan pelajaran dan kemudian ditarik kesimpulan. Untuk mengukur dan menghindari kesalahan dalam penafsiran masing-masing variabel, maka variabel yang termasuk dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah peran jasa konsultasi perpajakan (X1) dan manfaat jasa konsultasi perpajakan (X2). Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak, baik wajib pajak badan maupun orang pribadi.

2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh klien dari perusahaan konsultan pajak Smart Solution, baik Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi. Berdasarkan data yang diterima, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh klien baik perusahaan maupun perorangan yang berjumlah 100 wajib pajak. Teknik penelitian ini menggunakan purposive sampling untuk menentukan sumber data. Menurut Sugiyono (2020), purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel data dengan aspek-aspek tertentu. Terdapat dua golongan responden di dalam penelitian ini yang pertama merupakan klien Wajib Pajak Badan dan yang kedua yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Sugiyono (2018), pengertian sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data penelitian ini merupakan responden atau klien dari Kantor Konsultan Pajak Smart Solution yang merupakan Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperoleh dalam penelitian ini ialah berasal dari teknik yang dikelola dan dianalisis secara pribadi dari hasil kuesioner. Diberikan secara langsung kepada responden yang sudah dijadikan sampel, kuesioner berisi beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Menurut Sugiyono (2019:199), Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

5. Metode Analisis

Metode Analisa data dengan analisis regresi linier berganda karena variabel independen dalam penelitian ini lebih dari satu. Metode yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan program pengolahan data atau *software* data yaitu SPSS versi 23. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menentukan seberapa besar pengaruh hubungan antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Metode analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X1 = Peran Jasa Konsultan Pajak

X2 = Manfaat Jasa Konsultan Pajak

a = Konstansta

β_1 dan β_2 = Koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen

e = Error

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian Uji Regresi Linier Berganda

Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients Beta</i>	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6,506	2,872		2,266	,026
PJKP (X ₁)	,404	,112	,404	3,608	,001
MJKP (X ₂)	,370	,112	,369	3,293	,001

a. Dependen Variabel: KWP

Tabel 1 : Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Pada Tabel dapat menunjukan bahwa persamaan regresi linier berganda adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$KWP = 6,506 + 0,404 X_1 + 0,370 X_2 + e$$

Persamaan regresi linier berganda diatas menunjukkan bahwa baik variabel peran jasa konsultan pajak dan manfaat jasa konsultan pajak bernilai positif, dapat diartikan bahwa kedua variabel tersebut yaitu Peran dan Manfaat Jasa Konsultan Pajak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan. Dari persamaan tersebut juga dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Nilai Constanta adalah 65,06, artinya jika tidak terjadi perubahan variabel (X_1 , X_2 adalah 0) peran jasa konsultan dan manfaat jasa konsultan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan sebanyak 6,506 satuan.
- b) Nilai koefisien regresi (X_1) peran jasa konsultan pajak sebesar 0,404 satuan. Peran seorang Jasa Konsultan Pajak khususnya kantor Smart Solution bagi wajib pajak baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
- c) Nilai koefisien regresi (X_2) manfaat jasa konsultan pajak sebesar 0,370 satuan. Dengan menggunakan Jasa Konsultan Pajak di Kantor Smart Solution, Wajib Pajak merasakan keuntungan atau manfaat yang diberikan. Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan akan secara tidak langsung menarik Wajib Pajak lain untuk lebih taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R square	Adjust R Square	Std. Error of the Estimate
1	,713 ^a	,508	,495	3,152

a. Predictor (Constant), Manfaat Jasa Konsultan Pajak (X_1), Peran Jasa Konsultan pajak (X_2)

b. Dependent Variable : Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel 2 : Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil uji koefisien determinasi dengan menggunakan program SPSS 23 diperoleh nilai adjusted R^2 sebesar 0,495 atau 49,5%. Sedangkan R square sebesar 0,508 atau 50,8%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebesar 50,8% variabel peran jasa konsultan pajak (X_1) dan manfaat jasa konsultan pajak (X_2) berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan (Y).

PEMBAHASAN

1. Peran Jasa Konsultan Pajak Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan.

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada penelitian ini dapat diketahui bahwa peran jasa konsultan pajak dengan nilai koefisien B sebesar 0,404 dan signifikansi bernilai $0,001 \leq 0,05$ dapat diartikan bahwa peran jasa konsultan pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan, sehingga hipotesis diterima. Peran yang ditawarkan Kantor Konsultan Pajak Smart Solution kepada Wajib Pajak, baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan, sangat berpengaruh terhadap tanggung jawab perpajakannya karena tanggung jawab tersebut ditangani oleh Konsultan Pajak. Pelayanan jasa perpajakan mendatangkan penghematan melalui pelaksanaan perencanaan pajak sehubungan dengan peraturan perpajakan yang berlaku, administrasi perpajakan, bantuan pengendalian perpajakan, pemutakhiran informasi perpajakan, pengolahan SPT, pelaporan kewajiban perpajakan wajib pajak, petunjuk khusus dalam pengolahan perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Agustina Prativi (2020), Deden Iwan (2021), Khiara Ambiri (2022), Hadi Sugianto (2022), dan I made et al (2020) yang menganalisis tentang peran jasa konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang kemudian dapat disimpulkan bahwa profesi konsultan pajak di Indonesia sebagai agen pemerintah untuk membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan.

2. Manfaat Jasa Konsultan Pajak Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada penelitian ini dapat diketahui bahwa manfaat jasa konsultan pajak dengan nilai koefisien B sebesar 0,370 dan signifikansi bernilai $0,001 \leq 0,05$ dapat diartikan bahwa manfaat jasa konsultan pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan, sehingga hipotesis diterima.

Manfaat yang diberikan Kantor Konsultan Pajak Smart Solution, wajib pajak Orang Pribadi dan Badan secara tidak langsung akan menarik wajib pajak lainnya untuk menggunakan jasa konsultasi dalam mengelola kewajiban perpajakannya dan semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Peningkatan tersebut dilihat dari semakin bertambahnya wajib pajak yang menggunakan jasa konsultan pajak di Kantor Smart Solution hal tersebut terindikasi adanya rekomendasi dari wajib pajak kepada wajib pajak lain untuk

menggunakan jasa di kantor konsultan Smart Solution.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Adam ismail (2020), Willi Fatimaleha et al (2020), Niswatin dan Heny (2020) yang menganalisis tentang dampak atau manfaat yang dirasakan Wajib Pajak apabila menggunakan jasa konsultan pajak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dapat disimpulkan bahwa manfaat yang dirasakan wajib pajak mulai dari kenyamanan saat pendampingan pemeriksaan, efisiensi perpajakan sampai dengan *tax planning* yang dilakukan oleh jasa konsultan pajak berpengaruh signifikan terhadap oeningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan.

3. Peran dan Manfaat Jasa Konsultan Pajak Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan

Bersasarkan hasil uji hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi uji f sebesar $0,000 \leq 0,05$. Terdapat pengaruh antara variabel peran jasa konsultan pajak (X_1) dan manfaat jasa konsultan pajak (X_2) secara simultan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak (Y). Ke dua variabel X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y.

Peran Jasa Konsultan Pajak yaitu memberikan pelayanan terkait administrasi perpajakan, bimbingan khusus pengerjaan pajak , pelaksanaan tax planning, pengerjaan laporan Keuangan Fiskal serta semua yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi.

Manfaat yang didapat wajib pajak terkait kewajiban perpajakannya yaitu efisiensi perpajakan, tingkat kesalahan dalam mengerjakan kewajiban perpajakan lebih rendah , lebih nyaman ketika pemeriksaan pajak, serta kelancaran dalam beraktivitas dikarenakan sudah mempercayakan semua pengurusan administrasi perpajakan kepada Konsultan Pajak

Kepercayaan yang dimiliki wajib pajak menjadikan wajib pajak bertekad dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan yang diberikan oleh Konsultan Pajak khususnya Konsultan Pajak Smart Solution mempunyai dampak dan keuntungan atau manfaat langsung terhadap Wajib Pajak badan dan orang pribadi. Hal ini juga meningkatkan jumlah wajib pajak Orang Pribadi dan Badan yang menggunakan jasa. Semakin banyak wajib pajak yang menggunakan jasa Konsultan pajak, maka semakin banyak pula wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

V. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan analisis regresi berganda sebagai alat

untuk menguji hipotesis, maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran jasa konsultan pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan.
2. Manfaat jasa konsultan pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan.
3. Terdapat pengaruh antara variabel peran jasa konsultan pajak dan manfaat jasa konsultan pajak secara simultan terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan. Dengan adanya penelitian ini membuktikan bahwa semakin banyak wajib pajak yang menggunakan konsultan pajak maka semakin meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan.

Saran

1. Bagi pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak untuk lebih percaya kepada profesi konsultan pajak sebagai agen pemerintah dalam membantu wajib pajak menjalankan kewajiban pajaknya dan karena tidak semua wajib pajak memahami kewajiban pajaknya.
2. Bagi masyarakat yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan untuk lebih meningkatkan kesadaran akan kewajiban perpajakannya, dan apabila tidak memahaminya segera untuk berkonsultasi kepada konsultan pajak atau kepada kantor pajak setempat.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel dan indikator lain yang dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Badan.

DAFTAR PUSTAKA

Adriani, P.J.A. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. PT. Gramedia, Jakarta.

Agung Jatmiko. 2022. Memahami 3 Sistem Pemungutan Pajak Yang Berlaku Di Indonesia, (online) Ekonopedia (<https://katadata.co.id>, diakses 14 Juli 2023)

Agung, Dewa, dkk. 2020. Pengaruh Kualitas dan Kepuasan Pelayanan Pajak Terhadap Motivasi Membayar Pajak Serta Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*. Vol.16. *Issue* 2.

Agustina, Avivah. 2022. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak Badan Menggunakan Jasa Konsultan Pajak. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*. Vol.6.No2.

- Aida Holandari. 2022. Kenali Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia. Artikel Pajakku,(online). (<https://www.pajakku.com> diakses 14 Juli 2023)
- Alifia, Aulia. 2023. Pengaruh Perencanaan Pajak , Biaya Operasional, Dan Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi PT Catur Sentosa Adiprana. *Jurnal Soetomo Accounting Review* Volume 1 Nomor 3 (hlm.344-356).
- Ambiri. 2022. *Pengaruh Integritas, Kreativitas, Dan Kualitas Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Pengguna Jasa Konsultan Pajak Cv. Meutia)*. repository.uma.ac.id
- Astria Fitria. 2021. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, KonsultanPajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Aulia, Wahyuni. 2020. Determinasi Penggunaan E-Filling Dengan Modernisasi Kesiapan Teknologi Informasi. *Jurnal Akuntansi Integratif*.
- Basuki. 2018. Pengaruh Peran Konsultan Pajak Terhadap Penerapan *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratam Ilir Timur Palembang).(online) (<https://jurnal.um-palembang.ac.id> diakses pada 20 Juni 2023).
- Budileksmana, Antariksa. 2015. Manfaat dan Peranan Konsultan Pajak dalam Era *Self Assesment* Perpajakan. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol.1 No.2 hal:77-84.
- Elim, Imelda. 2017. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Menggunakan Jasa Konsultan Pajak (*Analysis Of Factors Affecting Taxpayers Using Tax Consultant Services*). *Jurnal EMBA*. Vol.5. No2.
- Esti, Aulia. 2023. Moderasi Pemilikan Manajerial Pada Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tanggungan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan & Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020. *Jurnal*

Ilmiah Akuntansi Indonesia.

Fatimaleha, Sofia dkk. 2020. Peran Tax Planning Dan Konsultan Pajak: Upaya Kepatuhan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Statera*.

Hertati Lesti, 2021. Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. Vol.7 No2.

Ismail Adam. 2020. Analisis Peran Konsultan Pajak Dalam Pendampingan Pemeriksaan Wajib Pajak. *Repository Stie Mahardika*.

Iwan Deden, 2021. Analisis Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Sosial Dan Teknologi* .Vol.1 No 12.

Kalyana Mitta K, Eko Suwadi, 2020. Pengaruh Kualitas Jasa Konsultan Pajak, Keadilan Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan. (online) (<http://etd.repository.ugm.ac.id/> diakses pada 15 Juli 2023)

KA Siti, Kajian Pustaka Review Penelitian-Penelitian Terdahulu. *Repository STEI*.

Menkeu. 2023. Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Tahun Berturut-turut (kemenkeu.go.id).

Maulana, Azhami. 2020. Pengaruh Kualitas Jasa Konsultan Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Binjai. Universitas Medan Area, Medan.

Pemerintah Indonesia. 2021. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 Harmonisasi Perpajakan. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak. Jakarta, 9 Juni 2014.

Putu, Made, 2020. Pengaruh Penerapan *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi

Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Denpasar. Jurnal Widya Akuntansi dan Keuangan.

Rachel Yolanda Pratiwi s, 2023. Sejarah Pajak di Indonesia, Sejak Zaman Kerajaan, (online). (<https://www.pajak.com> diakses pada 20 Juli 2023).

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-undang. Sekretariat Negara. Jakarta.

Sayidah, Nur. Metodologi Penelitian (Disertai Dengan Contoh Penerapan Dalam Penelitian). Sidoarjo:Zifatama,2018.

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta, Bandung.